



BADAN PENGURUS WILAYAH KERUKUNAN KELUARGA LUWU RAYA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sekretariat: Jl. Sultan Alauddin Komp. Ruko Pa'baeng-baeng No.98/Blok.10 Makassar
Telp/WA.0812-416-6599 Instagram: @kklrayasulsel Website: www.sulsel.kklr.org

PANDANGAN BPW KKLRL Sulawesi Selatan Tentang Investasi Pertambangan dan Hilirisasi di Kawasan Luwu Raya

Kawasan Luwu Raya merupakan salah satu wilayah strategis di Sulawesi Selatan yang dianugerahi sumber daya alam melimpah, khususnya di sektor pertambangan dan mineral. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini menjadi perhatian utama dalam agenda investasi nasional, seiring dengan dorongan kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang digalakkan pemerintah.

Di satu sisi, investasi pertambangan dan hilirisasi memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam waktu relatif singkat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat posisi daerah dalam rantai nilai industri nasional.

Namun di sisi lain, praktik investasi yang tidak berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal dan generasi mendatang.

Dalam konteks inilah, Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLRL) Sulawesi Selatan merasa perlu menyampaikan pandangan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap masa depan Luwu Raya.

1. **BPW KKLRL Sulawesi Selatan pada prinsipnya tidak menolak investasi**, termasuk investasi pertambangan dan hilirisasi, sepanjang dilaksanakan secara bertanggung jawab, berkeadilan, dan berkelanjutan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. **Investasi yang masuk ke kawasan Luwu Raya harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat setempat**, baik melalui peningkatan kesempatan kerja lokal, penguatan ekonomi masyarakat, transfer pengetahuan dan teknologi, maupun kontribusi terhadap pembangunan dan kas daerah.
3. **Hilirisasi sumber daya alam (SDA) harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat**, bukan sekadar perpanjangan dari praktik eksploitasi bahan mentah yang merugikan daerah penghasil.
4. **KKLRL Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan ekologi Luwu Raya** sebagai syarat mutlak dalam setiap aktivitas pertambangan dan industri hilir. Kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana ekologis merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup generasi saat ini dan masa depan. Bencana ekologis yang terjadi belakangan ini adalah alarm serius bagi praktek pertambangan dan industri hilir agar memperhatikan aspek lingkungan dengan konsekuen.
5. **KKLRL Sulawesi Selatan menolak model investasi yang hanya mengeruk kekayaan sumber daya alam secara eksploitatif**,



BADAN PENGURUS WILAYAH KERUKUNAN KELUARGA LUWU RAYA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sekretariat: Jl. Sultan Alauddin Komp. Ruko Pa'baeng-baeng No.98/Blok.10 Makassar
Telp/WA.0812-416-6599 Instagram: @kklrayasulsel Website: www.sulsel.kklr.org

meninggalkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta beban ekologis jangka panjang bagi masyarakat lokal.

6. **Pemanfaatan SDA dalam bentuk tambang eksploratif dan industri hilir di kawasan Luwu Raya perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas ekonomi kerakyatan** terutama di sektor non-tambang sehingga dapat tercipta kemandirian ekonomi masyarakat pasca-tambang.
7. **Keterlibatan sumber daya manusia (SDM) dari masyarakat lokal dan pemangku kepentingan daerah** sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan investasi harus dijamin secara transparan dan lebih bermakna.

BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya Sulawesi Selatan memandang bahwa masa depan Luwu Raya tidak boleh dipertaruhkan atas nama investasi jangka pendek dengan keuntungan yang dianggap besar di awal, tetapi menyisakan potensi kerugian bahkan jauh lebih besar di masa mendatang. Pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan antargenerasi.

Oleh karena itu, BPW KKLRL Sulawesi Selatan mendorong seluruh pihak—pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya—untuk menempatkan kepentingan masyarakat Luwu Raya sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan dan praktik investasi pertambangan serta hilirisasi.

Pemerintah daerah se-Luwu Raya sudah harus memikirkan orientasi pembangunan yang tidak lagi bertumpu pada sektor tambang semata, tetapi menempatkan sektor non-tambang terutama di sektor agro-maritim sebagai fondasi ekonomi jangka panjang.

Demikian pandangan ini dibuat sebagai frame organisasi dalam mengawal masa depan Luwu Raya yang berdaulat atas sumber daya alamnya, sejahtera secara ekonomi, dan lestari secara ekologis.

Billahi Taufiq Wal Hidayah
Makassar, 17 Desember 2025

**BADAN PENGURUS WILAYAH
KERUKUNAN KELUARGA LUWU RAYA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**


Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, MM
Ketua,-

